

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 17/HK.01.01/K.JT-17/07/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI NOMOR 6 /HK.01.01/K.JT-17/01/2026 TENTANG JADWAL
PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat demokrasi substansial dan mempersiapkan pengawasan Pemilu Tahun 2029, perlu dilaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, perlu ditetapkan jadwal pelaksanaan konsolidasi demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengawsan Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
- 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategis dan Teknis Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- 9. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tigas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
- 10. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 049/HK.01.01/K.JT-16/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 6/HK.01.01/K.JT-17/01/2026 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI:
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan susunannya sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi Masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

- KETIGA** : Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sebagaimana dalam Diktum KEDUA disertai surat tugas serta wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 30 Juli 2026

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI TAHUN 2026

NO	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Bulan																						
			Agustus					September					Oktober				November				Desember				
			Minggu Ke					Minggu Ke					Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				
1	Konsolidasi Demokrasi		I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	
	Diskusi terkait dengan isu politik uang/disinformasi/hoax/netralitas ASN/TNI/POLRI/Gejala Oligarki/Gejala Otoritarianisme/Kebijakan-kebijakan Pemerintah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota atau Kebijakan lain terkait dengan Demokrasi serta dapat berdiskusi berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Demokrasi dan Pemilihan Umum atau isu lainnya	Masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok, maupun dengan pemangku kebijakan																							

Keterangan:

1.

SUPRIYANTO, SH. HM
2.

SIGIT PAMUNGKAS, A.Md.T
3.

MOH. PRIYO MANFAAT, SH.I, MH
4.

AYU DWI LESTARI, S.Kom, MM
5.

ZAENAL ABIDIN, SE. Sy

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.